

## **Napas Baru Ilmu Pemerintahan:**

Catatan Lokakarya Kurikulum Jurusan Ilmu Pemerintahan UNILA 2016

Oleh: Budi Kurniawan, SIP, MPP

Bisa dikatakan akhir-akhir ini studi atau lebih populer menggunakan kata Ilmu mengalami krisis identitas. Kampus UGM misalnya menambahkan kata politik dan agak membingungkan program studi lain di luar UGM mengapa UGM harus menambah kata politik. Di IPDN malah ilmu pemerintahan ini semakin aneh. Pendekatan di IPDN bisa dikatakan tertinggal berapa dekade dan bahkan tidak kontekstual dengan dinamika pemerintahan hari ini. IPDN lebih tepatnya sekolah militer ketimbang sekolah sipil yang berparadigma "public service" atau pelayan publik. Yang unik pengalaman mereka yang pernah mengajar S2 lulusan IPDN sama seperti mengajar robot ketimbang manusia. Di UNPAD sebenarnya ilmu pemerintahan pun tidak jelas. Ada eksodus dosen lulusan luar negeri yang belajar ilmu politik ke jurusan baru yakni ilmu politik. Penulis bisa katakan unpad berusaha menginisiasi Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (APSIPI) yang membahas kurikulum yang malah cenderung monolitik dalam metodologi. Penulis yang pernah ikut forum APSIPI melihat ada kecenderungan APSIPI malah membuat homogenitas dan kapling ilmu di tengah trend pendekatan multi disiplin. Ironisnya APSIPI malah terjebak dalam pendekatan old institutionalisme yang legal formalistik dalam melihat fenomena pemerintahan.

### **Perlunya Pluralisme Pendekatan**

Jika penulis melihat trend studi pemerintahan, setidaknya ada beberapa teori atau pendekatan yang mewarnai sejarah studi pemerintahan di dunia. Yang pertama adalah pendekatan old institutionalism. Pendekatan ini adalah pendekatan awal dalam studi pemerintahan yang pada waktu itu belum dikenal istilah ilmu politik. Governance studies atau studi pemerintahan lebih banyak dengan menjadikan lembaga pemerintah yang menjadi objek kajian. Bisa dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu politik

generasi awal dimana fokus studinya adalah lembaga-lembaga negara. Pendekatan ini masih mengkaji lembaga pemerintahan dari aspek legal formalistik. Ilmu Pemerintahan bisa dikatakan lebih ke studi tentang hukum yang berbicara apa seharusnya, bukan apa yang terjadi dan mengapa terjadi.

Uniknya di Amerika Serikat sendiri ilmu pemerintahan yang mengkaji lembaga pemerintahan secara khusus dinamakan Administrasi Publik. Government studies atau beberapa kampus menggunakan ilmu politik setelah trend pendekatan statistik di Amerika bisa dikatakan ilmu induk dan Administrasi Publik adalah cabangnya. Untuk pengkhususan yang sama yakni studi lembaga pemerintahan, tradisi eropa menggunakan nama Bestuur dari Bahasa Belanda yang artinya pemerintahan. Jika kita cek website di kampus-kampus Belanda hari ini kata jurusan Bestuur adalah padanan kata untuk jurusan Public Administration jika untuk Amerika. Artinya fokus studi mereka sama yakni lembaga pemerintahan. Ketika Belanda menjajah Indonesia, studi ala Leiden ini kemudian diteruskan oleh UGM dengan membentuk jurusan Pemerintahan. Dalam sejarahnya jurusan ini sempat digabung dengan jurusan Administrasi Negara di UGM, namun kemudian karena memiliki tradisi dan historis yang panjang, jadilah jurusan ini dipisah kembali walau secara fokus dan objek materil sama saja. Kerancuan inilah kemudian yang diadopsi kemudian oleh kampus yang meniru UGM. Di sisi yang lain UI tetap tidak pernah membuka jurusan Ilmu Pemerintahan. Dalam hal ini UI lebih "benar" ketimbang UGM.

Ilmu Pemerintahan UGM sempat mengalami krisis identitas ketika banyak para dosennya pulang dari Amerika dan membawa pendekatan yang kedua dalam ilmu politik yakni behavioralisme ke Indonesia. Walau begitu ada tambahan kurikulum politik dan masih ada pendekatan Institusi lama yang dipertahankan dosen-dosen lama. Walau tidak merubah nama, curriculum Hybrid antara public administration (old institutionalism) dan ilmu politik (behavioralisme) ini di UGM berlangsung lama setidaknya berakhir setelah banyak lulusan Eropa dan Australia mewarnai UGM.

Hari ini diluar dua pendekatan itu kurikulum jurusan pemerintahan bisa dikatakan ilmu pemerintahan tidak ada pendekatan yang baku. Ada yang menyamakannya dengan ilmu politik bahkan ada yang menolaknya dan menyatakannya ini berbeda seperti yang dilakukan APSIPI walau terjebak dengan pendekatan monolitik old institutionalism. Prof Purwo Santoso sendiri dalam sebuah diskusi dengan penulis tahun 2015 yang lalu merasa bingung dengan pemisahan kata politik dan pemerintahan seolah-olah kapling yang berbeda. Menurut beliau itu sama saja. Yang kemudian semakin membuat runyam dibukanya Jurusan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Negara dan Ilmu Pemerintahan di UNPAD dan Brawijaya secara bersamaan. Jurusan ilmu pemerintahan seakan-akan berbeda dengan jurusan ilmu politik dan bukan pula jurusan administrasi negara.

Penulis sendiri merasa perdebatan bahwa ilmu pemerintahan dan ilmu politik itu kaplingnya berbeda sudah harus ditinggalkan. Menurut penulis jati diri ilmu pemerintahan itu sendiri ya sama dengan ilmu politik yang seperti Marsh dan Stoker (2011) katakan lebih banyak mengkaji tentang negara sebagai yang dominan. Nah ketika kita sepakat bahwa studi ini tentang lembaga pemerintahan maka yang perlu dibangun adalah pluralisme pendekatannya. Kita sebagai ilmuan jangan terlampau sibuk dengan objeknya apa tetapi kemudian alat yang digunakan monolitik yakni old institutionalism. Sebagai peneliti kita bisa menggunakan palu, pisau, gergaji, gunting, tetapi tidak boleh juga fanatik dengan satu perspektif, "pokok e palu" hingga memecahkan telur juga pakai palu, yang tidak tepat tentunya menggunakan palu, karena bisa *muncrat* ke wajah. Tantangan kita adalah mengevaluasi konteks dari objek ilmu (lembaga pemerintahan) itu apa dan alat (pendekatan, teori) apa yg relevan, atau malah buat alat (teori) sendiri yg berkontribusi bagi ilmu pemerintahan itu sendiri.

### **Apa Napas Baru itu ?**

Salah satu trend studi ekonomi hari ini yang menjadi gairah bagi ilmuan pemerintahan untuk melirik kembali ilmunya yakni pendekatan new institutionalism. Pendekatan ini

populer ketika buku *Why Nations fail* karya Daron Acemoglu dari MIT dan James Robinson dari Chicago university (2012) dan tulisan ekonomi politik Dani Rodrik (2004) professor ekonomi politik dari Harvard, menjadi perhatian dunia untuk melihat mengapa suatu negara sejahtera sedang yang lain miskin yakni karena institusi baik politik maupun ekonomi yang *extractive* (*exclusive*). Buku ini menarik seolah menantang ilmuwan pemerintahan bahwa : "ini lho ladang emas kalian jika ingin berkontribusi bagi ilmu pengetahuan dan kebijakan".

Untuk itulah mengapa perlu ada pendekatan multi disiplin berbagai ilmu yakni perlunya belajar ekonomi dan ilmu sosial lainnya untuk mahasiswa ilmu pemerintahan. Dani Rodrik (2015) sendiri mengakui bahwa trend ilmu ekonomi hari ini harus juga mempelajari politik (pemerintahan) untuk mengetahui konteks permasalahan ekonomi suatu bangsa, dan kita ilmu pemerintahan menurut hemat penulis juga harus mempelajari bagaimana cara berpikir ekonom yang *rational* itu bekerja dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan. Kita tidak melulu terjebak menjelaskam intrik dan motivasi elite politik yang selama ini jadi trend pengamatan pengamat politik di TV atau bahkan yang lebih parah aspek legal formalistik saja. Ini bukan berarti hal ini ditinggalkan karena keputusan yang menurut kita paling menguntungkan bagi publik tidak berada di ruang hampa. Ada ruang yang ada hambatan politik dan institusi yang bisa menjadi hambatan kebijakan itu diimplementasikan. Pendekatan yang pluralis dan multi disiplin inilah rekomendasi yang bisa kita tawarkan di kurikulum ilmu pemerintahan saat ini.

## **Penutup**

Tulisan ini pendapat awal penulis, bisa diterima ataupun tidak. Masukan dan perbaikan dari rekan-rekan dosen sangat diharapkan untuk perbaikan kurikulum Jurusan Ilmu Pemerintahan UNILA dan Indonesia pada umumnya. Kontribusi kita sebagai ilmuwan hari ini sangat diharapkan bangsa ini untuk memperbaiki berbagai persoalan.

## Referensi

Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). *Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business.

Marsh, D., & Stoker, G. (Eds.). (2010). *Theory and methods in political science*. Palgrave Macmillan.

Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). Institutions rule: the primacy of institutions over geography and integration in economic development. *Journal of economic growth*, 9(2), 131-165.

Rodrik, D. (2015). *Economics Rules: Why Economics Works, when it Fails, and how to Tell the Difference*. OUP Oxford.